

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusallam, H. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, P. (1986). *Penology*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewi, A. (2014). Pola Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Didalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana (Studi Dibalai Pemasyarakatan Kelas Ii Pekan Baru). *Jurnal Jom*, 1(Issn:2355-7681), 2.
- Dirjodosisworo, S. (1972). *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Keadilan dan Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni.
- Firmansyah, R., Ali, D., & Suhaimi. (2013). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Langsa. *Syah Kuala*, 2(Issn:2302-0180), 1.
- Harsono, C. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, C. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hr Soegondo. (1994). *Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konferensi Lembang 1964 Serta Pengebangannya Dewasa Ini*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasaribu, F. S. (2016). Pembebasan Bersyarat Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Usu Law*, 4.
- Pawennei, M. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomo 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, R. (1987). *Stelsel Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sanjaya Putera, G. N. A. (2013). Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Denpasar. *E-Jurnal Udayana, Volume 01*.
- Setiady Tolip. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabetha.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, M. (2013). Keseimbangan Asas Monodualistik Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan Pp Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Setelah Pp Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Pp Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarta Dan Tata C. *Jurnal Mahasiswa Hukum Untan*, 3(Issn:0216-2091), 5.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (1998). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.